



EDISI JUMAT 09 JANUARI 2026

MARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan



LEBIH BESAR PASAK DARIPADA TIANG DI APBN 2026

Pemerintah resmi mengunci APBN 2026 lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 yang telah disahkan DPR dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun, sejak awal arah anggaran sudah menunjukkan persoalan klasik yaitu 'lebih besar pasak daripada tiang'. Belanja negara pada 2026 dipatok mencapai Rp 3.842,73 triliun, sementara pendapatan negara hanya ditargetkan Rp 3.153 triliun. Jurang ini membuat APBN 2026 defisit Rp 689 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam aturan tersebut tercantum rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dan program. Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja negara terbesar untuk Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mencapai Rp268 triliun. Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh anggaran belanja Rp187,1 triliun. Alokasi terbesar akan digunakan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan mencapai Rp83,4 triliun. Kemudian, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp81,4 triliun. Untuk menutup 'lubang' tersebut, pemerintah memilih jalan mengandalkan pembiayaan utang hingga Rp 832,20 triliun. BACA HAL 11....

Gambaran Umum APBN 2026

- APBN 2026 ditetapkan lewat UU No. 17 Tahun 2025
- Disahkan DPR: September 2025
- Ditandatangani Presiden Prabowo: 22 Oktober 2025

Pendapatan vs Belanja

Pendapatan Negara: Rp 3,153 triliun	Selisih (Defisit) Rp 689 triliun
Belanja Negara Rp 3.842,73 triliun	Defisit setara 2,68% PDB

02	GOVERNMENT TODAY Sah! Pimpin Dewan HAM PBB 2026 Indonesia Janji Imparsial dan Transparan
04	NUSANTARA Penerbangan Juanda Dialihkan ke Semarang akibat Puting Beliung
10	LISTSTYLE Planetarium Jakarta Digandrungi Lagi, Wisata Edukasi Antariksa dengan Teknologi Terkini

BANJIR HANCURKAN 4 DESA DI HALMAHERA BARAT

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, sedikitnya 4 desa terdampak banjir yang melanda Kecamatan Ibu. Desa-desa tersebut meliputi Desa Gamlamo, Desa Tongute Ternate Asal, Desa Gam Ici, dan Desa Tongute Ternate. Selain kerusakan bangunan, banjir juga berdampak langsung terhadap 3.444 jiwa, yang sebagian terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman untuk menghindari luapan air susulan. Tampak sejumlah warga membersihkan genangan lumpur dan perabot rumah tangga usai banjir di Desa Tongute Ternate Asal, Kamis (8/1/2026). (ist.ant)

5 KEMENTERIAN/ LEMBAGA DENGAN ANGGARAN JUMBO (2026)

Badan Gizi Nasional
Rp 268 triliun

Kementerian Pertahanan
Rp 187,1 triliun

Kepolisian Negara RI
Rp 146 triliun

Kementerian Pekerjaan Umum
Rp 118,5 triliun

Kementerian Kesehatan
Rp 114 triliun



Cara Menutup Defisit

Utang baru Rp 832,21 triliun	Investasi pembangunan Rp 203,06 triliun
Pembiayaan lain Rp 60,40 triliun	Pemberian pinjaman Rp 404,15 miliar

SAH! PIMPIN DEWAN HAM PBB 2026

INDONESIA JANJI IMPARSIAL DAN TRANSPARAN

Indonesia resmi dipercaya memimpin Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada tahun 2026. Penetapan ini menandai tonggak penting diplomasi Indonesia di kancah internasional, sekaligus bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penetapan Indonesia dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa, Swiss.

"Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ditetapkan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama tahun 2026 di Jenewa," demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia



akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM sepanjang tahun 2026. Kemlu menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang, sejalan dengan programme of work tahunan Dewan

HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama komunitas internasional.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara khusus menekankan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara

imparsial, objektif, dan transparan.

Menurut Kemlu, presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut juga ditegaskan Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri. Ia menyatakan bahwa Indonesia akan mengusung tema "Presidency for All" selama masa kepemimpinannya.

"Indonesia akan menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 ini dengan selalu imparsial, objektif, dan transparan," ujar Indah dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Indah menjelaskan, tema "Presidency for All" mencerminkan pendekatan Indonesia yang menekankan komunikasi inklusif dalam berinteraksi dengan negara-negara anggota Dewan HAM PBB. Indonesia, kata dia, akan selalu membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM.

"Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga, mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM," kata Indah.

Lebih lanjut, Indah menilai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan rekam jejak panjang Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional dan internasional.

Presidensi pertama Indonesia di Dewan HAM PBB ini juga ditegaskan sebagai upaya memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Indonesia sendiri resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026 melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Penetapan ini sejalan dengan mekanisme rotasi kawasan, di mana negara-negara Asia-Pasifik memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026.

"Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional," tutup Kemlu.

Sejauh ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB. Posisi Wakil Presiden tersebut sebelumnya diemban oleh Dubes Dian Triansyah Djani pada 2009 dan Dubes Febrian A. Ruddy arad pada 2024. (wid,rls/dya)

Profil Sidharto Reza Suryodipuro, Presiden Dewan HAM PBB Wakili RI



tama ditujukan kepada Kelompok Asia Pasifik, tempat Indonesia bernaung, atas nominasinya, dan kepada Dewan secara keseluruhan atas dukungannya pagi ini," kata Sidharto dalam pidatonya, Kamis (8/1/2026).

Sidharto Reza Suryodipuro, yang akrab disapa Arto, merupakan mantan Direktur Jenderal

Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Jabatan itu diembannya sejak Oktober 2020 hingga November 2025.

Sebelum mengurus ASEAN, Arto menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk India dan Bhutan pada 2017-2021. Ia juga pernah menjadi Deputy Chief of Mission di Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Washington DC pada 2014-2017.

Karier Arto di Kementerian Luar

DUTA Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Sidharto terpilih usai Indonesia dinominasikan sebagai calon tunggal oleh kelompok negara Asia Pasifik, yang tahun ini memegang keketuaan di Dewan HAM PBB sesuai mekanisme rotasi per kawasan.

"Apresiasi tulus saya pertama-

Negeri dimulai sejak Maret 1992. Ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia untuk PBB hingga menjadi delegasi RI untuk komite khusus PBB dalam operasi perdamaian di bawah Majelis Umum PBB.

Pada 2004-2006, Arto menjadi first secretary di Kedubes RI di Canberra, yang bertanggung jawab dalam mempromosikan kerja sama Indonesia-Australia di berbagai bidang.

Pada 2006 hingga 2009, Arto kembali dipercaya sebagai perwakilan Indonesia untuk PBB, namun kali ini di New York, Amerika Serikat (AS). Saat itu ia mengurus persoalan kemanusiaan di Afrika.

Mulai Maret 2009 hingga Juni 2010, Arto ditunjuk menjadi wakil direktur untuk Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada Mei 2010 sampai November 2014, ia dipromosikan menjadi direktur untuk kerja sama intra-regional Asia Pasifik dan Afrika, yang memimpin dan mengordinasikan kerja sama antarlembaga untuk kepemimpinan Indonesia pada 2013. (wid,rls/dya)

GELAR RAPAT DI MASA RESES, DPR: POLRI TETAP DI BAWAH PRESIDEN

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan dua pakar guna mendengarkan pendapatnya terkait upaya reformasi Polri. Rapat digelar pada saat DPR RI masih dalam masa reses, Kamis (8/1/2026). Hasilnya, Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden.

Kesimpulan tersebut disepakati dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026), dengan menghadirkan dua pakar sebagai narasumber.

Kesimpulan rapat dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath. Ia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR telah sesuai dengan amanat reformasi.

"Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI telah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rano.

Kesimpulan tersebut kemudian dikonfirmasi ulang kepada seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir dalam rapat.

"Setuju nggak ini?" tanya Rano. "Setuju," jawab serempak anggota Komisi III DPR.

Selain menegaskan aspek struktural kelembagaan Polri, rapat juga menyepakati pentingnya percepatan reformasi kultural di tubuh kepolisian. Reformasi budaya ini dinilai krusial untuk membentuk Polri yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan penegakan hukum.

"Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi kultural di tubuh Polri, khususnya terkait budaya kerja, organisasi, dan kelompok yang mendukung terciptanya Polri yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Setuju?" kata Rano.

Pernyataan tersebut kembali disambut persetujuan peserta rapat dan diketuk palu sebagai penutup



Komisi III DPR menggelar Rapat Kerja Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan mengundang dua ahli hukum Muhammad Rullyandi (Pakar Hukum Tata Negara) dan Ahli Kriminolog UI Adrianus Eliasta Sembiring di Ruang Komisi III, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/1/2026).ist

agenda.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa rapat tetap digelar meskipun DPR tengah memasuki masa reses.

Menurut dia, Komisi III ingin memastikan proses reformasi aparat penegak hukum tetap terbuka terhadap masukan publik dan kalangan akademisi.

Ada Usul Polri 'Dibelah' dengan 2 Wakapolri

PAKAR Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Adrianus Eliasta Sembiring Meliala mengusulkan Polri dibagi berdasarkan wilayah teritorial. Hal ini dilakukan guna memperpendek rentang kendali organisasi dan memperkuat pengawasan internal.

Usulan tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Adrianus, persoalan budaya organisasi di tubuh Polri, erat kaitannya dengan lemahnya pengawasan akibat luasnya wilayah kerja dan panjangnya struktur komando.

"Kalau dalam hal ini soal budaya itu soal pengawasan, maka bagaimana kalau kita belah dua kepolisian ini, ada Polri wilayah timur dan Polri wilayah barat," ujar Adrianus.

Ia menilai, pembagian tersebut akan memudahkan pimpinan tertinggi untuk lebih sering berada di lapangan sekaligus memfokuskan pengawasan terhadap potensi penyimpangan.

"Dengan begitu, berbagai macam

penyimpangan itu lalu kemudian dapat lebih mudah difokuskan, pimpinan tertinggi lebih mudah untuk berada di lapangan, sekaligus juga untuk mendekripsi penyimpangan yang terjadi," katanya.

Adrianus mencontohkan, pembagian itu dapat diikuti dengan penunjukan wakil kepala kepolisian untuk masing-masing wilayah.

"Saya mengusulkan misalnya Polri wilayah timur ada wakapolri A, Polri wilayah barat ada wakapolri Bnya," ucap Adrianus.

Ia menegaskan, secara struktur dan fungsi keduanya tetap sama, hanya wilayah pengendaliannya yang dibagi. Dengan begitu, kontrol organisasi menjadi lebih pendek dan efektif.

"Semuanya sama, tapi dibagi dua. Sehingga kita bisa semakin fokus. Kontrol makin pendek, dan alhasil aneka macam penyimpangan yang tadinya tidak terlihat, kalau Kapolrianya cuma satu, wakapolriya cuma satu, dengan adanya dua wakapolri ini, maka kemudian makin mudah terlihat dan sekaligus dengan cepat tertanggulangi," jelas dia.

Anggota Komisi III DPR RI

"Komisi III DPR RI ingin terus menerima kontribusi pemikiran terhadap reformasi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan," kata Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, RDPU bukan kali pertama digelar. Komisi III sebelumnya juga telah beberapa kali mengundang ahli dan menerima laporan serta aduan dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi reformasi hukum. (gus,ist,rls/dya)

RAPOR PUBLIK 1 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

Penegakan Hukum & Kepercayaan Institusi

63.7% Puas
dengan Kinerja Polri

63.2% Percaya
dengan Kinerja KPK

61% Puas
dengan Layanan & Kehadiran Polri

Harmonisasi & Keamanan Nasional

89.5 Persen
Menilai Pemerintah Berhasil Menjaga Kerukunan

83 Persen
Merasa Keamanan Nasional Terjaga



Hasbiallah Ilyas menilai usulan pembagian Polri ke dalam dua wilayah, sebagai ide yang cemerlang, namun tetap perlu pendalaman serius agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Hasbiallah menegaskan, reformasi Polri harus diarahkan pada percepatan pembentahan institusi agar semakin profesional dan berintegritas, sebagaimana praktik penegakan hukum di negara-negara dengan budaya hukum yang telah mapan.

"Yang kita inginkan, kita reformasi, percepatan reformasi Polri ini sebagus-bagusnya seperti di negara-negara yang di Belanda lah misalnya, atau di hukumnya memang budaya hukumnya memang sudah settle bener," kata Hasbiallah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). (wid,inj,ist/dya)

PENERBANGAN JUANDA DIALIHKAN KE SEMARANG AKIBAT PUTING BELIUNG

Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang dan fenomena puting beliung melanda kawasan Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (8/1/2026). Peristiwa ini berdampak pada operasional penerbangan, dengan tiga pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

PERINGATAN DINI TINGGI GELOMBANG WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Masa Berlaku: 9 Januari 2026
(Pukul 07.00 WIB) sampai 12 Januari 2026 (Pukul 07.00 WIB).

Wilayah dengan Tinggi

Gelombang 1.25 - 2.5 Meter

- Selat Malaka bagian utara.
- Samudra Hindia barat Aceh, Kep. Nias, Kep. Mentawai, Bengkulu, dan Lampung.
- Samudra Hindia selatan Banten.
- Selat Karimata bagian selatan.
- Laut Jawa bagian barat, tengah, dan timur.
- Selat Makassar bagian selatan.
- Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Seram.
- Laut Sulawesi bagian timur dan Laut Maluku.
- Samudra Pasifik utara Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.
- Laut Arafuru bagian utara.

Wilayah dengan Tinggi

Gelombang 2.5 - 4.0 Meter

- Selat Karimata bagian utara.
- Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan NTB.
- Laut Arafuru bagian tengah dan barat.



Tangkapan layar angin puting beliung terjang Bandara Juanda, Kamis (8/1/2026). Ist

Otoritas bandara memastikan bahwa secara umum operasional dan pelayanan di Bandara Juanda tetap berjalan normal dan aman. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, menyampaikan bahwa kondisi

terminal dan area sisi udara tidak mengalami gangguan serius pascakejadian cuaca ekstrem tersebut.

"Seluruh fasilitas terminal dan area sisi udara Bandara Juanda dalam kondisi aman. Operasional dan pelayanan bandara tetap berjalan

normal," ujar Tohir dalam keterangan resminya.

Namun, akibat kondisi cuaca yang memburuk, sejumlah penerbangan yang semula dijadwalkan mendarat di Juanda harus dialihkan demi keselamatan penerbangan. "Terdapat tiga penerbangan yang melakukan pengalihan pendaratan (divert) menuju Bandara Ahmad Yani Semarang. Kami terus berkoordinasi dengan maskapai serta AirNav Indonesia terkait penyesuaian jadwal penerbangan berikutnya," jelasnya.

Selain berdampak pada penerbangan, angin kencang juga menyebabkan kerusakan di area darat bandara. Beberapa pohon di kawasan parkir Terminal 1 dilaporkan tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang terparkir. Meski demikian, pihak bandara memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Tidak terdapat korban jiwa atas kejadian ini," tegas Tohir.

Pihak bandara mengimbau para calon penumpang untuk aktif memantau informasi terbaru terkait status penerbangan melalui maskapai masing-masing atau Contact Center 172. Bandara Juanda juga terus menjalin koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait guna memastikan keselamatan operasional dan kenyamanan penumpang.

"Kami akan terus memonitor perkembangan cuaca dan menyampaikan informasi secara berkala," pungkasnya.

Sementara itu, BMKG mengonfirmasi bahwa angin puting beliung yang terjadi di sekitar Terminal 1 Bandara Juanda berlangsung sekitar 10 menit. Kepala Stasiun BMKG Juanda Surabaya, Taufiq Hermawan, mengatakan kejadian ini menjadi pengingat bahwa dinamika atmosfer pada puncak musim hujan masih sangat aktif dan berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem secara tiba-tiba.

"Kita masih berada pada puncak musim penghujan. Jadi peringatan dini itu terus kami update, mulai 10 harian, kemudian diverifikasi lagi 3 harian, bahkan sampai paling rapat satu jam ke depan," kata Taufiq.

Menurut Taufiq, fenomena puting beliung dipicu oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil akibat pertumbuhan awan Cumulonimbus (CB) di wilayah bandara. "Pada jam 14.00 kami amati memang ada awan CB yang ngeblok di atas wilayah bandara. Kemudian awannya terkondensasi dan menjulur ke permukaan menjadi puting beliung. Ini akibat perbedaan tekanan antara lapisan awan dengan permukaan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun tanda-tanda cuaca buruk bisa terpantau, kejadian puting beliung secara spesifik masih sulit diprediksi. Dalam banyak kasus, parameter yang mirip justru hanya memicu hujan lebat atau angin kencang sesaat. (wid,ist,ssn/dya)

BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi di Perairan Bali dan Banyuwangi

Cahyo Nugroho, menjelaskan bahwa peningkatan tinggi gelombang dipengaruhi oleh pola angin yang cukup kuat di wilayah perairan tersebut.

"Pola angin di perairan selatan Bali bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 30 knot," kata Cahyo di Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2026), dikutip dari Antara.

Menurut analisis BBMKG, kecepatan angin yang tinggi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketinggian gelombang laut, khususnya di perairan terbuka dan selat-selat utama di sekitar Bali. Setidaknya terdapat tiga wilayah perairan di selatan Bali yang berpotensi mengalami gelombang laut hingga empat meter, yakni Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Bali, serta Selat Lombok bagian selatan.

Selain wilayah selatan, kondisi angin kencang juga terpantau di perairan utara Bali. Di kawasan ini, pola angin bergerak dengan arah yang sama dan kecepatan hingga 30 knot atau sekitar 55 kilometer per jam. Untuk perairan utara Bali, Selat Badung, serta Selat Lombok bagian

utara, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai hingga 2,5 meter.

Peringatan ini menjadi perhatian penting mengingat perairan Bali merupakan jalur strategis yang ramai dilalui kapal penumpang, kapal feri, kapal logistik, hingga perahu nelayan. Selain itu, jalur laut ini juga menopang sektor pariwisata, terutama perjalanan menuju destinasi wisata bahari seperti Nusa Penida.

Sementara itu, BMKG Banyuwangi juga mengeluarkan peringatan dini serupa terkait potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi. Gelombang laut dengan ketinggian hingga empat meter berpotensi terjadi di perairan Banyuwangi bagian selatan dalam rentang waktu 8 hingga 11 Januari 2026.

BMKG Banyuwangi menjelaskan, gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan. Adapun gelombang kategori tinggi, dengan ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter, diperkirakan terjadi di perairan selatan Banyuwangi.(wid,ant/dya)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah perairan di sekitar Bali dan Banyuwangi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca laut ini dinilai berisiko terhadap aktivitas pelayaran, perikanan, serta transportasi penyeberangan antarpulau, terutama di wilayah perairan selatan.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mencatat, potensi gelombang tinggi di perairan Bali diperkirakan berlangsung pada periode 9 hingga 12 Januari 2026. Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar,

BATAS WAKTU HARI INI, 95% CALON HAJI REGULER SUDAH BAYAR

Sebanyak 95 persen lebih calon jamaah haji reguler telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Pemerintah memberi waktu hingga Jumat (9/1/2026) hari ini bagi siswa jamaah yang belum melakukan pelunasan untuk segera menuntaskan kewajibannya.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa hingga penutupan pelunasan pada sore hari sebelumnya, tingkat pelunasan BPIH jamaah haji reguler telah mencapai 95,42 persen. Sementara itu, untuk jamaah haji khusus, angka pelunasan bahkan sudah menembus 96 persen.

"Pelunasan haji reguler dan khusus sampai penutupan sore kemarin, penutupan hari (kemarin), 95,42% untuk jamaah haji reguler," kata Irfan Yusuf dalam agenda Outlook Penyelenggaraan Haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan, masih terdapat waktu dua hari bagi jamaah yang belum melunasi biaya haji. Pemerintah optimistis seluruh kuota akan terpenuhi sebelum batas akhir pembayaran.

"Masih ada waktu dua hari untuk pelunasan dan insyaallah kita akan bisa capai 100 persen dua hari mendatang," ucapnya.

Menurut Irfan, tingginya tingkat pelunasan ini mencerminkan kesiapan sekaligus antusiasme jamaah Indonesia untuk berangkat menuaikan ibadah haji pada 2026. Pemerintah pun mengimbau jamaah yang belum melakukan pelunasan agar segera memanfaatkan sisa waktu yang tersedia.

Di luar aspek pembiayaan, Kementerian Haji dan Umrah juga terus mematangkan berbagai persiapan teknis penyelenggaraan haji. Dalam kesempatan yang sama, Irfan memaparkan perkembangan kesiapan layanan haji di Tanah Suci, mulai dari administrasi jemaah, akomodasi, transportasi, hingga tata kelola dan pengawasan.

"Proses dan progres persiapan di Tanah Suci sudah cukup jauh, kita sudah memastikan dua syarikah (perusahaan) yang akan melayani jemaah haji kita, kita sudah memastikan tempat-tempat di Armuzna, Arafah, Musdalifah, dan Mina," ujar Irfan, yang akrab disapa Gus Irfan.

Ia menyebut, sebagian besar layanan utama telah dipastikan. Transportasi dan konsumsi jemaah disebut sudah mencapai kesiapan 100 persen. Untuk akomodasi, khususnya di Madinah, progresnya telah mencapai 93 persen, sementara



Petugas saat merapikan tempat tidur di Gedung Roudho Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (22/4/2025). Ist

akomodasi di Makkah masih dalam tahap penyelesaian.

"Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen, akomodasi di Makkah belum terlalu signifikan, tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai," ucapnya.

Gus Irfan mengakui, dalam proses

penyiapan layanan tersebut terdapat berbagai kendala, termasuk banyaknya pihak yang ingin menjadi penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia. Namun ia menegaskan, pemerintah tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Tapi prinsip kita tetap lurus, kita harus akuntabel dan transparan,"

Petugas Diminta Fokus Layani Jamaah, Bukan Nebeng Berhaji

WAKIL Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan seluruh petugas haji harus menjadikan pelayanan jamaah sebagai orientasi utama, bukan memanfaatkan penugasan untuk sekadar menuaikan ibadah haji.

"Ini, kan, banyak juga kritik dari teman-teman publik, jamaah, segala macam terkait dengan komitmen pelayanan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya adalah pelayanan jamaah, bukan nebangnaik haji," ujar Dahnil saat menutup Training of Trainer (ToT) petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Dahnil, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masih ditemukan petugas yang memiliki motivasi utama untuk beribadah haji, padahal tugas utama petugas haji menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan fisik yang sangat besar.

"Petugas haji itu bekerja hampir tanpa henti. Kerjanya bisa 25 jam, mayoritas kerja fisik. Jadi, kalau mau

fokus ibadah, ya jangan jadi petugas," ujarnya.

Selain meluruskan orientasi, bimbingan teknis petugas haji yang akan dimulai pada 10 Januari 2026 hingga sebulan ke depan juga menekankan integritas, kedisiplinan, dan kekompakkan tim.

Ia menilai persoalan kerja tim dan koordinasi menjadi catatan serius dalam evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya.

"Pelayanan di Madinah dan Makkah itu kerja tim. Kalau kedisiplinan dan koordinasi bermasalah, jamaah yang dirugikan," katanya.

Untuk memperkuat karakter tersebut, Kementerian Haji dan Umrah mengadopsi pendekatan pelatihan militer, termasuk simulasi pelayanan di Tanah Haram dan Masyair, serta uji fisik.

"Kami ingin petugas yang siap secara mental, fisik, dan waktu. Kalau merasa tidak siap, lebih baik tidak ikut, karena yang ingin jadi petugas haji itu jutaan orang," ujar Dahnil.

Ia menegaskan petugas haji

katanya.

Dari sisi penerbangan, pemerintah memastikan pengaturan sudah dilakukan sejak jauh hari. Permintaan jam terbang ke Arab Saudi telah diajukan oleh dua maskapai yang akan melayani jemaah, yakni Saudia Airlines dan Garuda Indonesia. (wid,ist,kum/dya)

5 provinsi dengan kuota terbanyak (2026)

Jawa Timur
42.409 jamaah

Jawa Tengah
34.122 jamaah

Jawa Barat
29.643 jamaah

Sulawesi Selatan
9.670 jamaah

Banten
9.124 jamaah

merupakan inti dari pelayanan haji, sehingga hanya mereka yang memiliki dedikasi penuh yang akan diberi amanah.

Dalam kesempatan itu, Dahnil mengungkapkan jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri tahun ini ditambah hingga dua kali lipat atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menyusul kinerja yang dinilai disiplin dan bertanggungjawab.

Selain penambahan personel, Kementerian Haji dan Umrah juga menyiapkan sistem penghargaan bagi petugas haji berprestasi.

"Ukuran keberhasilan petugas haji adalah dedikasinya melayani jamaah. Bukan seberapa banyak ibadah pribadinya, tetapi seberapa baik ia melayani," kata Dahnil. (wid,ist,ant/dya)

Pemkot Malang Targetkan Kemiskinan Menurun Jadi 3,25 Persen di 2029

MALANG - Tren angka kemiskinan di Kota Malang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun memasang target bisa menekan persentase penduduk miskin hingga 3,25 persen pada 2029. Diketahui pada 2025 berada di angka 3,85 persen.

"Kalau melihat data selama 10 tahun ini, angka kemiskinan di Kota Malang memang terus menurun. Dari yang awalnya di kisaran 4,6 persen, di 2025 sudah di angka 3,85 persen," ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (8/1/2026).

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, pada 2024 lalu angka kemiskinan di Kota Malang masih berada di kisaran 3,91 persen.

Angka tersebut kemudian menurun pada 2025 menjadi 3,85

persen. Penurunan ini menjadi dasar bagi Pemkot Malang dalam menyusun target jangka menengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam dokumen RPJMD, Pemkot Malang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,63 persen pada 2026. Target tersebut berlanjut pada 2027 di angka 3,52 persen, kemudian 3,43 persen pada 2028, hingga mencapai 3,25 persen pada 2029.

Meski demikian, Donny menegaskan penetapan target penurunan angka kemiskinan tidak semata-mata berorientasi pada capaian persentase. Menurutnya, aspek terpenting adalah bagaimana penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

"Targetnya memang kita pasang turun, tetapi yang terpenting adalah penanganan kemiskinannya. Itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinsos, melainkan harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, juga

dengan pemerintah pusat dan provinsi," jelasnya.

Donny menambahkan, kolaborasi lintas sektor tersebut sangat bergantung pada kualitas data. Ia menilai pengukuran dan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama agar intervensi penanganan kemiskinan dapat tepat sasaran.

"Karena di situ ada pembagian desil yang menjadi dasar penentuan intervensi. Kalau datanya diperkuat, intervensi bisa lebih tepat sasaran. Semua penanganan kemiskinan hulunya ada di data, sehingga pendekatannya bisa holistik dan melibatkan semua perangkat daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Donny juga



Ilustrasi: warga lansia penerima manfaat bantuan sosial di Kecamatan Klojen, Kota Malang. (dok. kecklojen_malangkota)

menjelaskan, penanganan kemiskinan di Kota Malang dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Bappeda. Melalui tim tersebut, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran dan sasaran intervensi yang jelas. (Santi/Dya)

Tak Ada Pengadaan Truk Sampah di APBD 2026, Pemkab Malang Andalkan Bantuan Perusahaan



Ilustrasi: Truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. (dok. Ist/tangkap layar DLH, malangkab)

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dipastikan tidak mengalokasikan anggaran pengadaan truk sampah baru di APBD 2026. Pemkab memilih mengandalkan bantuan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial guna menambah armada di wilayah tersebut.

"Untuk TA 2026 memang tidak ada penganggaran penambahan truk

sampah. Karena tahun ini juga alokasi anggaran ke DLH itu dipangkas," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Dikatakannya, pengadaan armada pengangkut sampah telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. "Di APBD Kabupaten Malang tahun anggaran (TA) 2025 kemarin, kami sudah menganggarkan dan merealisasikan pengadaan lima unit truk sampah baru," katanya.

Pria yang akrab dengan sapaan Avi ini menjelaskan, lima unit truk sampah tersebut saat ini telah beroperasi dan digunakan untuk menunjang efektivitas pengangkutan sampah di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Penambahan armada tersebut diharapkan mampu mengurangi kendala operasional yang selama ini dihadapi DLH.

Avi menuturkan untuk tahun

anggaran 2026, DLH Kabupaten Malang harus menyesuaikan program kerja akibat pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Dari total anggaran sebelumnya sekitar Rp60 miliar, DLH mengalami pemotongan hingga Rp10 miliar.

Meski tidak ada dukungan pengadaan armada baru melalui APBD, pihaknya mengaku tidak tinggal diam. Avi berupaya mencari alternatif lain untuk memperkuat sarana pengangkutan sampah, salah satunya dengan mengoptimalkan peran tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Disebutkannya, DLH terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai perusahaan swasta serta organisasi nirlaba, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Agar dapat menyalurkan bantuan CSR berupa truk sampah.

Upaya tersebut, kata Avi, terbukti membawa hasil. Sepanjang tahun 2025, Pemkab Malang telah menerima sejumlah bantuan CSR berupa truk sampah baru yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah.

"Pada tahun 2025 kemarin, kami juga menerima total lima unit truk sampah dari program CSR," jelasnya.

Menurut Avi, bantuan CSR tersebut sangat membantu DLH Kabupaten Malang, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dengan tambahan armada, pelayanan pengangkutan sampah diharapkan tetap berjalan optimal.

Ke depan, DLH Kabupaten Malang berharap semakin banyak perusahaan dan organisasi nirlaba yang berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan lingkungan melalui program CSR, khususnya dalam bentuk bantuan armada pengangkut sampah.

"Harapannya, di tahun 2026 ini semakin banyak pihak yang menyalurkan CSR-nya berupa truk sampah. Ini penting untuk membantu percepatan penanganan sampah dan mendukung target zero waste di Kabupaten Malang," pungkas Avi.

Sebagai informasi, hingga akhir tahun 2025, DLH Kabupaten Malang telah memiliki sebanyak 78 unit truk pengangkut sampah. Terdiri dari 70 arm roll truck, dan 8 dump truck yang melayani total 33 kecamatan di wilayahnya. (Santi/Dya)

AS MUNDUR DARI 66 ORGANISASI DUNIA

Amerika Serikat (AS) menarik diri dari 66 organisasi dunia. Penarikan diri ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani memorandum tentang penarikan AS dari puluhan organisasi dunia itu. Dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), Trump mengatakan organisasi itu dianggap "tidak lagi melayani kepentingan Amerika".

Perintah eksekutif pada Rabu (7/1/2026) waktu setempat untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional, termasuk sejumlah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini menegaskan langkah AS semakin menjauh dari kerja sama global.

Gedung Putih mengambil keputusan tersebut setelah peninjauan menyeluruh atas partisipasi dan pendanaan AS terhadap organisasi internasional. Banyak lembaga yang terdampak bergerak di bidang perubahan iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan isu sosial, yang oleh pemerintahan Trump dinilai mendorong agenda "woke".

Istilah "woke" digunakan kubu Trump untuk merujuk pada kebijakan atau gerakan yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan gender, hak minoritas, dan isu lingkungan, yang dianggap terlalu progresif dan bertentangan dengan nilai konservatif serta kepentingan nasional AS.

"Institusi-institusi ini kami nilai



Presiden Trump berbicara di Majelis Umum PBB tahun lalu. PBB belum mengomentari putusnya hubungan Amerika dengan beberapa organisasinya. (dok.NYT)

tumpang tindih, salah kelola, boros, dan telah disusupi kepentingan yang mengancam kedaulatan serta kemakmuran AS," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataannya.

Beberapa lembaga PBB yang terdampak antara lain UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim), UNFPA (Dana Kependudukan PBB), serta sejumlah

komisi dan badan penasihat PBB di bidang HAM, ketenagakerjaan, dan pembangunan.

Selain itu, AS juga menarik diri dari organisasi non-PBB seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance (lembaga bantuan demokrasi internasional) dan Global Counterterrorism Forum (forum kerja sama kontra-terorisme global).

ORGANISASI INTERNASIONAL NON-PBB YANG AKAN DITARIK KEANGGOTAANNYA OLEH AS:

- Pakta Energi Bebas Karbon 24/7;
- Dewan Rencana Colombo;
- Komisi Kerjasama Lingkungan Hidup;
- Pendidikan Tidak Bisa Ditunda;
- Pusat Keunggulan Eropa untuk Pemberantasan;
- Forum Laboratorium Penelitian Jalan Raya Nasional Eropa;
- Koalisi Kebebasan Online;
- Dana Keterlibatan dan Ketahanan Komunitas Global;
- Forum Kontra Terorisme Global;
- Forum Global tentang Kehilangan Siber;
- Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan;
- Institut Antara-Amerika untuk Penelitian Perubahan Global;
- Forum Antar Pemerintah tentang Pertambangan, Mineral, Logam, dan Pembangunan Berkelanjutan;
- Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim;
- Platform Antar-pemerintah untuk Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem;
- Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Restorasi Properti Budaya;
- Komite Penasihat Kapas Internasional;
- Organisasi Hukum Pembangunan Internasional;
- Forum Energi Internasional;
- Federasi Internasional Dewan Kesenian dan Badan Kebudayaan;
- Lembaaga Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu;
- Institut Internasional untuk Keadilan dan Supremasi Hukum;
- Kelompok Studi Timbal dan Seng Internasional;
- Badan Energi Terbarukan Internasional;
- Aliansi Surya Internasional;
- Organisasi Kayu Tropis Internasional;
- Uni Internasional untuk Konservasi Alam;
- Institut Geografi dan Sejarah Pan Amerika;
- Kemitraan untuk Kerjasama Atlantik;
- Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampakan Bersama terhadap Kapal di Asia;
- Dewan Kerja Sama Regional;
- Jaringan Kebijakan Energi Terbarukan untuk Abad ke-21;
- Pusat Sains dan Teknologi di Ukraina;
- Sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik; dan
- Komisi Venesia Dewan Eropa.



Trump Undang Presiden Kolombia ke Gedung Putih

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundang Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk berkunjung ke Gedung Putih, hanya beberapa hari setelah sebelumnya melontarkan ancaman aksi militer terhadap Kolombia.

Trump mengatakan pengaturan pertemuan dengan Petro sedang disiapkan, menyusul pembicaraan telepon pertama antara kedua pemimpin sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025.

Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas hubungan bilateral serta sejumlah perbedaan pandangan yang selama ini memicu ketegangan.

"Itu suatu kehormatan besar bisa berbicara dengan Presiden Kolombia, Gustavo Petro, yang menelepon untuk menjelaskan situasi soal narkoba dan perbedaan lain yang pernah kami alami. Saya menghargai nada bicaranya dan menantikan pertemuan dengannya dalam waktu dekat," tulis Trump di media sosial.

Namun, Trump belum menyebutkan tanggal pasti pertemuan di Washington. Petro membenarkan adanya pembicaraan tersebut. Di

hadapan para pendukungnya dalam sebuah rapat umum di Bogota, ia mengatakan telah berbicara langsung dengan Trump dan meminta agar dialog antara Kolombia dan Amerika Serikat kembali dibuka.

Seorang sumber di kantor kepresidenan Kolombia menyebut percakapan itu berlangsung "akrab" dan "saling menghormati."

Undangan ini muncul setelah Trump pada Minggu lalu menyatakan bahwa kemungkinan operasi militer AS yang menargetkan pemerintah Kolombia "terdengar bagus" baginya.

Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah AS menculik presiden Venezuela, negara tetangga Kolombia, yang kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi diajakn narkoba dan senjata.

Presiden Kolombia Gustavo Petro buka suara usai diundang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih.

Petro berujar ia telah melakukan panggilan telepon dengan Trump pada Rabu (7/1/2025) dan sepakat memperbaiki hubungan antarpemerintah.

"Saya menjalin kembali

komunikasi untuk pertama kalinya," kata Petro kepada pendukungnya di pertemuan, seperti dikutip CNN.

Petro mengatakan ia dan Trump setuju untuk kembali menjalin hubungan langsung, baik di tingkat kementerian luar negeri maupun kantor kepresidenan.

Percakapan telepon Petro dan Trump itu sendiri berlangsung selama sekitar satu jam.

Hubungan Trump dan Petro memang membekuk sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Trump berulang kali menuduh pemerintahan Petro, tanpa menyertakan bukti, membiarkan aliran kokain masuk ke Amerika Serikat. Pada Oktober lalu, Washington bahkan menjatuhkan sanksi terhadap Petro.

Trump juga melontarkan pernyataan keras dengan menyebut Petro sebagai "orang sakit" yang gemar memproduksi dan menjual kokain ke AS.

Pada September, pemerintah AS mencabut visa Petro setelah ia ikut dalam demonstrasi pro-Palestina di New York dan menyerukan tentara AS agar "tidak mematuhi perintah Trump." (wid,cnn,ist/dya)

Penarikan diri ini terjadi di tengah kebijakan luar negeri agresif pemerintahan Trump, termasuk penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan sinyal keinginan AS mengambil alih Greenland. Pada hari yang sama, AS juga menyita dua kapal tanker minyak terkait Venezuela yang tengah dikenai sanksi.

"Penarikan diri ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang mengedepankan agenda globalis di atas prioritas AS, atau yang menangani isu-isu penting secara tidak efisien dan tidak efektif sehingga dana publik AS lebih tepat dialokasikan untuk mendukung misi lain yang relevan," demikian pernyataan resmi Gedung Putih.

Keputusan Trump ini mencerminkan kehati-hatiannya terhadap lembaga-lembaga multilateral, khususnya PBB. Trump sudah berulang kali mempertanyakan efektivitas, biaya, dan akuntabilitas badan-badan internasional, dengan alasan badan-badan tersebut seringkali gagal melayani kepentingan AS. (ap,rtr,ist/dya)

Inspirasi Cat Rumah Tren 2026

Membumi dan Ekspresif Pembangkit Suasana Hati

Inspirasi cat rumah tren 2026 akan diramaikan dengan palet warna baru yang mengutamakan nuansa hangat, membumi, dan lebih ekspresif. Pemilihan warna cat kini tidak lagi sekadar estetika, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan suasana nyaman dan mendukung suasana hati penghuni rumah. Warna tidak lagi hanya menjadi elemen dekoratif, tetapi juga respons terhadap kondisi emosional, sosial, dan lingkungan.

Para ahli serta perusahaan warna global telah merilis prediksi terbaru tentang warna-warna yang diperkirakan akan mendominasi pasar dekorasi dan interior rumah.

Tren warna cat rumah di tahun 2026 ini menunjukkan pergeseran dari estetika netral yang tenang ke arah ekspresi yang lebih berani, beragam, dan penuh karakter. Hal ini membuktikan bahwa rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan kanvas ekspresi diri yang mampu membangkitkan mood positif. Tren warna cat rumah 2026 didominasi oleh warna netral hangat dan membumi, memberikan kesan alami serta menenangkan.

Warna Putih

Warna seperti putih tulang, putih gading, dan broken white tetap menjadi favorit karena kesan bersih, terang, dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya desain modern.

Nuansa Krem

Nuansa krem, dempul, dan beige hangat juga akan menggantikan putih cerah yang mulai ditinggalkan. Warna-warna ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mampu membuat rumah terasa lebih luas, terang, dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, creméle neutrals dengan nuansa krem dan karamel akan semakin populer, memberikan lebih banyak karakter dibandingkan putih, namun tetap netral untuk melengkapi furnitur dan karya seni yang sudah ada.

Warna Beige

Warm beige memberikan kesan natural dan proporsional, cocok untuk ruang tamu bergaya minimalis atau Japandi karena membuat ruangan terasa lebih luas dan nyaman.

Sandstone beige diprediksi menjadi warna netral baru yang populer, cocok sebagai latar untuk aksen berwarna-warni tanpa menarik perhatian berlebihan.

Nuansa Hijau yang Menenangkan

Warna hijau diprediksi akan menjadi 'netral baru' di tahun 2026, menghadirkan kesan alami, segar, dan menenangkan. Nuansa hijau ini dipercaya mampu menyeimbangkan interior dan memberikan efek relaksasi. Mulai herbal green, sage green dan olive green.

Warm eucalyptus, rona hijau yang menenangkan dengan nuansa hangat diprediksi akan menjadi tren warna baru yang menenangkan kenyamanan di dalam hunian.

Olive green atau hijau zaitun akan sangat populer karena memberikan kesan menenangkan, abadi, dan elegan, cocok untuk suasana yang lebih lembut dan santai. Warna ini dapat digunakan sebagai cat dinding utama, aksen dinding, atau dihadirkan melalui elemen dekorasi.

Aksen Berani dan Dramatis

Meskipun warna netral mendominasi, inspirasi cat rumah tren 2026 juga menghadirkan aksen warna berani dan dramatis untuk memberikan karakter pada ruangan.

Merah anggur (Divine Damson) diprediksi akan menjadi tren, menawarkan kemewahan mendalam dan cocok diaplikasikan pada setiap gaya desain ruangan. Kombinasi maroon dan deep purple dapat membangkitkan semangat sekaligus kemegahan di dalam ruangan.

Burgundy menjadi warna yang kembali naik daun, memberikan kesan hangat, mewah, dan elegan tanpa membuat ruangan terasa gelap.

Lava Falls, merah bata intens yang dramatis, juga termasuk dalam prediksi warna unggulan Pantone untuk Spring/Summer 2026. Warna-warna ini memberikan kesan mewah dan berani, cocok untuk menciptakan pernyataan visual yang kuat.

Bold jewel tones juga akan mendefinisikan hunian mewah, memberikan sentuhan dramatis dan elegan. Warna-warna ini dapat digunakan sebagai aksen pada dinding fitur atau bingkai, memberikan sentuhan karakter tanpa mendominasi seluruh ruangan.

Selain itu, tren warna hybrid yang menggabungkan nuansa matte lembut dan kilau metalik juga akan muncul, cocok untuk tampilan modern dan artistik. Contohnya termasuk bronze matte, soft gold shimmer, dan silver frost. Ini memungkinkan pemilik rumah untuk bereksperimen dengan efek visual yang unik.

Bernuansa Cokelat Untuk Kamar Tidur

Kamar tidur di tahun 2026 akan mengutamakan warna-warna yang lembut dan menenangkan untuk mendukung istirahat dan relaksasi. Soft stone, abu-abu lembut, diprediksi akan menjadi tren karena memberikan rasa tenang dan nyaman. Setelah bertahun-tahun didominasi abu-abu dingin, orang-orang kini menginginkan warna hangat.

Muted green atau hijau lembut adalah pilihan yang tepat untuk kamar tidur karena memberikan kesan tenang dan membantu tubuh lebih rileks. Warna ini memberikan hubungan yang melekat dengan bumi dan alam, terasa lebih stabil. Light blue dusty, biru dengan sentuhan abu-abu lembut, juga banyak digunakan untuk menciptakan kesan ruangan yang lebih adem dan lapang, cocok untuk kamar tidur atau ruang kerja.

Cokelat hangat atau warm brown diprediksi akan menjadi warna yang viral di kamar tidur, memberikan kesan nyaman dan elegan. Pale lavender juga membuat ruangan terasa adem dan elegan, terutama ketika dikombinasikan dengan warna netral. (tin, lip, ist/dya)



Catatan Kelam Eksplorasi Antariksa 2025

Deretan Misi Gagal di Berbagai Negara

Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode paling sibuk dalam sejarah eksplorasi luar angkasa modern. Namun, di balik deretan pencapaian tersebut, terselip catatan lain yang tak kalah mencolok, yakni rangkaian kegagalan misi luar angkasa yang terjadi di berbagai negara.

Roket India Gagal Mengantarkan Satelit

Salah satu kegagalan terjadi pada 17 Mei 2025, ketika roket PSLV-XL milik India diluncurkan dari Satish Dhawan Space Centre. Roket tersebut membawa satelit radar pengamat Bumi EOS-09 untuk Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO). Namun, sekitar enam menit setelah terbang, roket mengalami gangguan pada tahap ketiga. Akibat kendala tersebut, EOS-09 gagal mencapai orbit dan dinyatakan hilang.

Misi Firefly Aerospace Berujung Kerugian

Perusahaan asal Texas, Firefly Aerospace, juga menghadapi tahun yang berat. Pada 29 April, roket Alpha diluncurkan dari California dalam misi keenamnya, membawa muatan demonstrasi teknologi milik Lockheed Martin ke orbit rendah Bumi.

Tahap atas roket sempat mencapai ketinggian sekitar 320 kilometer, tetapi gagal memperoleh kecepatan orbit akibat masalah teknis setelah pemisahan tahap. Muatan tersebut pun hilang.

Zhuque-2 China Alami Kegagalan Kedua

Di China, roket Zhuque-2 milik perusahaan rintisan LandSpace gagal dalam misi keenamnya pada 14 Agustus 2025. Roket dua tahap berbahan bakar metana cair dan

oksigen cair itu diluncurkan dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan. LandSpace tidak mengungkap muatan yang dibawa, namun kegagalan ini menjadi yang kedua bagi Zhuque-2, yang teknologinya sering dibandingkan dengan mesin Raptor milik SpaceX.

Ceres-1 Meledak di Udara

Beberapa bulan kemudian, roket China lainnya, Ceres-1 buatan Galactic Energy, mengalami nasib serupa. Roket tersebut meluncur pada 9 November dari Jiuquan,

membawa dua satelit pengamat Bumi komersial serta satu wahana antariksa milik universitas di China. Tiga tahap awal berjalan normal, tetapi tahap keempat mengalami anomali yang menggagalkan seluruh misi.

Selain itu, terdapat dugaan kegagalan lain pada kendaraan Kuaizhou 1A buatan ExPace yang diduga meledak di landasan peluncuran Jiuquan pada 1 Maret, meski insiden tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Jepang Kehilangan Satelit Navigasi

Jepang juga mengalami kegagalan menjelang akhir tahun. Pada 21 Desember 2025, roket H3 mengalami masalah pada tahap kedua saat meluncurkan satelit navigasi Michibiki 5. Roket gagal menempatkan satelit pada orbit yang diinginkan, dan Badan Penjelajahan Antariksa Jepang (JAXA) akhirnya menyatakan satelit tersebut hilang.

Peluncuran Orbit Perdana dari Eropa Berakhiri Tragis

Pada 30 Maret, perusahaan Jerman Isar Aerospace mencetak sejarah dengan meluncurkan roket Spectrum dari Pelabuhan Antariksa Andøya di Norwegia. Ini merupakan



penerbangan orbital pertama yang pernah dilakukan dari daratan Eropa. Namun, hanya 18 detik setelah lepas landas, roket mengalami anomali, jatuh kembali ke Bumi, dan meledak. Meski gagal, Isar Aerospace tetap melanjutkan persiapan untuk peluncuran kedua dari lokasi yang sama.

Roket Buatan Australia Gagal Debut

Kegagalan debut juga dialami oleh Gilmour Space dari Australia. Pada 29 Juli, perusahaan tersebut meluncurkan roket Eris dari Pelabuhan Antariksa Orbit Bowen di Queensland,

Roket buatan Australia pertama yang mencoba mencapai orbit itu justru meluncur miring dan jatuh ke tanah hanya 14 detik setelah lepas landas.

Korea Selatan Alami Nasib Serupa

Perusahaan rintisan Korea Selatan, Innospace, meluncurkan

roket orbit swasta pertama negaranya, Hanbit-Nano, pada 22 Desember. Namun, sekitar satu menit setelah terbang,

roket mengalami anomali dan jatuh kembali ke Bumi. Peristiwa ini menegaskan bahwa debut roket baru memang kerap diwarnai kegagalan.

Kegagalan Pendaratan Pendorong Roket

Sepanjang 2025, tercatat empat kegagalan upaya pendaratan pendorong roket, masing-masing dialami oleh New Glenn (Blue Origin), Falcon 9 (SpaceX), Zhuque-3 (LandSpace),

dan Long March 12A milik China. Meski keempat roket berhasil mencapai orbit, pendaratan pendorong sebagai target sekunder tidak tercapai.

Namun, mengingat sebagian besar merupakan penerbangan perdana, kegagalan ini tetap dipandang sebagai bagian dari proses pengembangan.

(ist,kcm/dya)



HARIAN
LENTERA
TODAY
Inspirasi Perubahan

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI) | **WARTAWAN MUDA I MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

Planetarium Jakarta Digandrungi Lagi, Wisata Edukasi Antariksa dengan Teknologi Terkini

Setelah vakum selama lebih dari satu dekade, Planetarium dan Observatorium Jakarta kembali membuka pintunya untuk publik. Berlokasi di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, destinasi wisata edukasi antariksa yang resmi kembali beroperasi sejak Selasa, 23 Desember 2025 digandrungi oleh masyarakat. Kini wajah baru dan teknologi terkini yang jauh lebih modern menjadi daya tariknya.



Kebangkitan Planetarium Jakarta menandai berakhirnya masa renovasi panjang selama 13 tahun. Kehadirannya disambut antusias masyarakat, khususnya pelajar dan keluarga, yang selama ini menantikan kembalinya salah satu ikon wisata edukasi sains di Ibu Kota.

Antusiasme tersebut semakin terasa setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan kebijakan pembebasan tiket masuk bagi pelajar selama tiga bulan ke depan.

Dalam kunjungannya ke kawasan TIM, Pramono menyampaikan rasa syukur atas kembali beroperasinya Planetarium Jakarta bersamaan dengan Paviliun Raden Saleh. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjadikan TIM sebagai pusat seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang inklusif bagi masyarakat.

Planetarium Jakarta sendiri merupakan bangunan berbentuk teater kubah yang dirancang khusus untuk menyajikan pertunjukan astronomi. Melalui teknologi proyeksi canggih, pengunjung diajak menjelajahi angkasa, mengenal benda-benda langit, serta memahami berbagai fenomena astronomi seolah menyaksikan langsung langit malam yang sesungguhnya.

Daya tarik utama Planetarium terletak pada Teater Bintang, sebuah ruang pertunjukan berkubah besar yang menawarkan pengalaman visual imersif. Dalam durasi sekitar 50 hingga 60 menit, pengunjung dapat menyaksikan simulasi pergerakan bintang, planet, meteor, hingga berbagai

fenomena kosmik lainnya. Materi pertunjukan mencakup proses terbentuknya tata surya, gerhana matahari dan bulan, hingga siklus kehidupan bintang.

Untuk pengunjung individu, jadwal pertunjukan Teater Bintang umumnya tersedia pada akhir pekan, dengan dua sesi utama pada pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB. Sementara pada hari kerja, Planetarium lebih memprioritaskan kunjungan rombongan, seperti sekolah dan institusi pendidikan.

Tak hanya menyuguhkan pertunjukan visual, Planetarium Jakarta juga dilengkapi Observatorium yang memungkinkan pengunjung melakukan pengamatan langsung terhadap benda-benda langit. Berbagai instrumen astronomi tersedia, mulai dari Teleskop ASKO reflektor berdiameter 31 sentimeter yang kerap digunakan untuk penelitian dan penentuan hilal Idulfitri, hingga Teleskop Takahashi dan Teleskop Coude.

Selain teleskop permanen, pengelola juga menyediakan sejumlah teleskop portabel yang dapat digunakan dalam kegiatan peneropongan rutin maupun saat terjadi fenomena astronomi tertentu.

Fasilitas lain yang tak kalah menarik adalah ruang pameran dan edukasi astronomi. Area ini menampilkan beragam koleksi edukatif, mulai dari alat observasi, galeri foto benda langit, pakaian luar angkasa, hingga fragmen batu meteor asli.

Diorama, poster, dan panel informasi tentang galaksi serta tata surya menjadikan ruang pameran ini sebagai sarana belajar yang ideal bagi pelajar maupun masyarakat umum.

Sebagai destinasi wisata publik, Planetarium Jakarta juga menyediakan fasilitas pendukung yang memadai. Area parkir luas, termasuk untuk bus rombongan, fasilitas toilet yang terawat, serta ruang tunggu berpendingin udara menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sambil menunggu jadwal pertunjukan, pengunjung dapat menikmati tayangan film edukatif bertema astronomi.

Menariknya, Planetarium Jakarta kini juga mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari inovasi layanan. Salah satu terobosan terbarunya adalah kehadiran AI Virtual Host, pemandu digital berbasis AI yang menyampaikan informasi seputar astronomi dan sejarah Planetarium secara interaktif. Teknologi ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik, terutama bagi generasi muda.

Dari sisi aksesibilitas, tingginya minat masyarakat membuat tiket pertunjukan Planetarium kerap habis terjual dalam waktu singkat. Untuk mengatur kunjungan, pendaftaran tiket dilakukan secara daring melalui akun resmi media sosial TIM Cikini. Pengunjung diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu karena kuota setiap sesi sangat terbatas.

Selama masa promosi pembukaan kembali, pengelola menetapkan harga tiket yang

relatif terjangkau. Tiket untuk masyarakat umum dibanderol Rp10.000, berlaku hingga April 2026. Sementara itu, pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun pelajar dari luar Jakarta dapat menikmati pertunjukan secara gratis dengan menunjukkan kartu pelajar asli.

Jejak Sejarah

Planetarium dan Observatorium Jakarta dibangun pada September 1964 oleh Pemerintah Indonesia atas gagasan Presiden Soekarno. Bung Karno ingin masyarakat Indonesia mengenal benda-benda langit, tata surya, galaksi, fenomena alam, dan sebagainya. Planetarium mulai dibangun pada 9 September 1964 dengan bantuan dana dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia.

Pembangunan sempat terhenti karena peristiwa G30S PKI dan baru dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 1967. Planetarium lalu diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 10 November 1967, bersamaan dengan peresmian Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Meski begitu, Planetarium baru dibuka untuk umum pada 1 Maret 1969. Tanggal itu yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Planetarium dan Observatorium Jakarta. Saat itu, Planetarium Jakarta merupakan yang terbesar di dunia dengan kapasitas 500 kursi. Kembalinya Planetarium Jakarta bukan sekadar membuka kembali objek wisata, tetapi juga menghidupkan ruang belajar sains yang selama ini dirindukan. (gus, ist/dya)

Lebih Besar Pasak...dari hal 1

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 akhirnya muncul di publik. Beleid ini menjadi dasar utama untuk pemerintah melakukan kebijakan pengelolaan anggaran negara selama setahun ke depan.

UU APBN telah disahkan pada rapat paripurna pada September lalu. Selanjutnya, beleid ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

APBN 2026 ditetapkan akan mengalami defisit Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena pendapatan negara dirancang lebih kecil daripada rencana belanja.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2026 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 689.147.902.608.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," tulis pasal 23 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Rabu (8/1/2026).

Dalam beleid yang sama, ditetapkan anggaran pendapatan negara pada 2026 dipatok mencapai Rp 3.153 triliun. Penerimaan negara akan berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Sementara itu belanja negara dirancang dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842,73 triliun. Cukup jauh lebih tinggi daripada penerimaan yang dirancang selama setahun. Rinciannya anggaran belanja akan dibagi dua, pertama untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.149,73 triliun dan kedua untuk anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 692,99 triliun.

Kembali ke pasal 23 ayat 1, defisit APBN 2026 rencananya akan ditutup dalam beberapa skema pembiayaan defisit. Mulai dari utang, investasi, dan beberapa skema lainnya.

Pembiayaan terbesar akan bersumber dengan bentuk penarikan utang Rp 832,21 triliun dan pembiayaan lainnya Rp 60,40 triliun. Sementara itu untuk investasi pembiayaan dipatok Rp 203,06 triliun dan pemberian pinjaman Rp 404,15 miliar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik bahwa himpitan perekonomian dunia berdampak langsung pada kinerja fiskal tahun 2025. Namun, Menkeu mengaku optimis bahwa di 2026 laju defisit APBN bisa ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

"Saya yakin tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatkan momentum

pertumbuhan ekonomi ke depan. Harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat lebih besar dibanding tahun lalu," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Januari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Menkeu, pelebaran defisit terjadi karena pemerintah harus menjaga laju perekonomian domestik agar tetap ekspansif ditengah tekanan perekonomian global. Karena itu, pemerintah tetap harus memacu perekonomian dengan sejumlah stimulus saat perekonomian sedang menurun ke bawah.

Dalam aturan tersebut tercantum rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dan program. Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja negara terbesar untuk Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mencapai Rp 268 triliun.

"Program dukungan manajemen Rp 12,4 triliun, program pemenuhan gizi nasional Rp 255,5 triliun," demikian tercantum dalam lampiran UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperoleh anggaran belanja

Rp 187,1 triliun. Alokasi terbesar akan digunakan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan mencapai Rp 83,4 triliun. Kemudian, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 81,4 triliun.

Di peringkat ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh porsi belanja terbesar mencapai Rp 146 triliun. Alokasi paling besar akan digunakan untuk program dukungan manajemen Rp 73 triliun, dan program modernisasi alutsista dan sarana prasarana Polri Rp 52,7 triliun.

Di sisi lain, anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 justru mencuat menjadi Rp 692,99 triliun dari acuan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 864,1 triliun. Secara rinci, anggaran TKD merosot Rp 171,1 triliun atau 19,8% dibanding tahun lalu.

Ekonomi Diprediksi Lebih Berat

Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya sebesar Rp 1.917,6 triliun. Realisasi ini setara 87,6% dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai realisasi penerimaan pajak tersebut mencerminkan adanya langkah luar biasa yang ditempuh pemerintah pada

pengujung tahun.

Menurut Fajry, capaian tersebut berada sedikit di atas batas atas estimasi yang selama ini ia perkirakan, yakni 85% plus minus 2,5%.

"Artinya, pemerintah mengambil langkah extraordinary dalam mengejar penerimaan pajak di akhir bulan," ujar Fajry, Kamis (8/1/2026).

Ia menyoroti lonjakan penerimaan pajak pada Desember 2025 yang mencapai Rp 283 triliun. Tambahan penerimaan tersebut dinilai sangat tidak lazim, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang mengalami kontraksi.

Sebagai perbandingan, pada periode 2021-2023 ketika terjadi booming komoditas dan target penerimaan tercapai, tambahan penerimaan di bulan Desember hanya berkisar Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun.

Bahkan pada 2024, lanjut Fajry, pemerintah hanya mampu menambah penerimaan sebesar Rp 243 triliun meski telah menggunakan berbagai upaya intensif. "Jadi, pemerintah kali ini menggunakan jurus maut sepertinya," imbuham dia.

Menurut perhitungan Fajry, tanpa langkah extraordinary tersebut, defisit anggaran berpotensi menembus lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang berarti melanggar ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.(wid,ist,ant,rls/dya)

Dana Desa Turun dari Rp71 Triliun Jadi Rp60,57 Triliun

PEMERINTAH menetapkan alokasi Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp 60,57 triliun. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang dipublikasikan pada Rabu (7/1/2026).

Dana Desa sendiri merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang pada 2026 dialokasikan sebesar Rp 692,99 triliun. Alokasi Dana Desa 2026 tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari total Rp 60,57 triliun tersebut, sebanyak Rp 59,57 triliun akan dibagikan melalui formula, sementara Rp 1 triliun dialokasikan sebagai insentif bagi desa yang berkinerja baik atau melaksanakan program pemerintah pusat.

Sementara bila dibandingkan dengan APBN 2025, dari total Rp 71 triliun yang ditargetkan oleh pemerintah, sebesar Rp 69 triliun dibagikan melalui formula, sementara Rp 2 triliun dialokasikan sebagai insentif bagi desa yang berkinerja baik atau melaksanakan program pemerintah pusat.

Sama halnya dengan APBN 2025, pemerintah juga mengatur pola

pembagian Dana Desa 2026 dengan komposisi 65% alokasi dasar, 1% afirmasi untuk desa tertinggal dan rentan bencana, 4% alokasi kinerja, serta 30% alokasi formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Sebagai catatan saja, kebijakan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2026 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Dalam beleid tersebut ditegaskan Dana Desa 2026 diprioritaskan untuk delapan fokus program utama, antara lain: penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan; penguanan Desa berketeraan iklim dan tangguh bencana; peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa.

Selain itu, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya; dukungan implementasi Koperasi

Desa Merah Putih; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa; pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Lebih jelasnya, untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dalam peraturan tersebut ditegaskan BLT Desa ditetapkan paling banyak Rp 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat, dengan pembayaran dapat dilakukan sekaligus paling banyak untuk tiga bulan. Penetapan penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa dengan mengacu pada data pemerintah.

Selain itu, penggunaan Dana Desa turut dialokasikan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih, termasuk percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkапannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa," lanjut bunyi Pasal 2 ayat (3)..(wid,blo,ist/dya)

KEJAGUNG BAWA TNI KE KEMENHUT: TEPIS PENGGELEDAHAN, SEBUT COCOKKAN DATA

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya buka suara terkait aktivitas penyidiknya di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rabu (7/1/2026). Ditegaskan kegiatan tersebut bukan penggeledahan, tapi hanya melakukan pencocokan data dalam rangka penyidikan perkara tambang di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Yang juga menjadi tanda tanya adalah kehadiran personel TNI saat aksi itu. Ada apa?

POIN-POIN UTAMA PERSOALAN TAMBANG DI KONAWE

- Penghentian Penyidikan oleh KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara yang sebelumnya diperkirakan merugikan negara Rp2,7 triliun. Alasan penghentian ini karena kerugian negara dianggap sulit diaudit secara final.
- Gugatan MAKI: Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK pada awal Januari 2026 atas keputusan SP3 tersebut.
- Penyidikan oleh Kejagung: Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan baru terkait dugaan korupsi perubahan fungsi kawasan hutan untuk tambang ilegal di Konawe Utara. Pada 8 Januari 2026, penyidik Kejagung mendatangi Kementerian Kehutanan untuk mencocokkan data terkait kasus ini.



KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar mengenai dugaan penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Rabu (7/1/2026).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa kehadiran penyidik Kejagung tersebut bukan dalam rangka penggeledahan. Ia menjelaskan, penyidik Kejagung datang untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan.

Menurut Ristianto, pencocokan data tersebut berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sejumlah daerah yang terjadi pada masa lalu, dan bukan



Anggota TNI ikut mengawal jalannya proses penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di Kantor Kemenhut, Rabu (7/1/2026). (ist.tangkap layar)

Kejaksaan Agung menjelaskan kehadiran personel TNI saat penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus mencocokkan data di Kementerian Kehutanan pada Rabu, 7 Januari 2026. Korps Adhyaksa ini menegaskan pelibatan TNI sebatas pengamanan kegiatan penyidikan.

"Kenapa ini dilakukan pelibatan TNI? Dalam rangka pengamanan. Ini kan d o k u m e n - d o k u m e n , dikhawatirkan terjadi seperti itu saja. Semata-mata itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Kejagung, Jakarta,

Kamis (8/1/2026).

Menurut Anang, penyidik tidak hanya melibatkan TNI saat mendatangi Kementerian Kehutanan. Ia menyebut personel militer juga hadir dalam sejumlah kegiatan lapangan sebelumnya. Selain itu, TNI selama ini mengamankan unsur kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung maupun kejaksaan tinggi di daerah.

"Secara payung hukumnya, kami ada dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2025, juga ada MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) antara Kejaksaan Agung dengan TNI,

Kemenhut: Transparansi Informasi

pada periode Kabinet Merah Putih.

"Proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi," ujar Ristianto dalam keterangan resminya.

Kemenhut memastikan seluruh rangkaian pencocokan data yang dilakukan oleh penyidik Kejagung berjalan dengan baik, tertib, serta dilakukan secara kooperatif. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga menyatakan kesiapan untuk mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Ristianto menyampaikan bahwa Kemenhut mengapresiasi langkah Kejagung

dalam rangka memperkuat tata kelola kehutanan atau forest governance di Indonesia.

"Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang," kata Ristianto.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah petugas berbaju merah, dibantu personel TNI, mendorong sebuah boks di lingkungan Kantor Kemenhut. Video tersebut memicu anggapan bahwa telah terjadi penggeledahan oleh penyidik Kejagung, yang kemudian di-klarifikasi oleh pihak Kemenhut. (ist,kum,ant/dya)

periode tahun tentu itu bisa diperpanjang," ujar Anang.

Kehadiran penyidik Jampidsus di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sempat memunculkan kabar penggeledahan. Namun Anang membantah informasi tersebut. Ia menyatakan penyidik hanya mencocokkan data mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, terutama hutan lindung di sejumlah daerah.

Anang mengatakan pencocokan data itu berkaitan dengan penyidikan perkara pembukaan kegiatan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. "Penyidikan perkara pembukaan kegiatan tambang oleh perusahaan-perusahaan yang masuk wilayah kawasan hutan yang diberikan oleh kepala daerah saat itu di Konawe Utara dengan melanggar dan tidak sesuai ketentuan," katanya.

Penyidik Kejaksaan Agung mendatangi Kementerian Kehutanan untuk mempercepat perolehan data yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Anang mengatakan, penyidikan kasus ini sudah dimulai sejak September 2025. Selain memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan, mereka sudah menyita sejumlah dokumen dan alat bukti.

"Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara," ucup Anang.

"Dari pengembangan itu kemudian kita membutuhkan data tambahan dari satker terkait dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Jadi kemarin datang itu dalam rangka pencocokan data," tambahnya.

Dalam kasus ini, Anang menjelaskan, Kejagung menduga adanya pemberian izin tambang yang tak sesuai dikeluarkan oleh kepala daerah kepada beberapa perusahaan.

"Kalau kita kan kegiatan penyidikannya itu kegiatan pembukaan tambang dan pengelolaan tambang yang masuk wilayah hutan. Nah, di samping itu juga diduga karena adanya pemberian izin oleh kepala daerah saat itu yang tidak sesuai prosedur," ucap Anang.(wid,ist,kum/dya)